

Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen

Talita Amanda Azarine, Didik Gunawan Suharto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret

email : talitaamanda@student.uns.ac.id, didikgusuharto@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan dengan mengukur efektivitas program yang dilihat dari empat aspek efektivitas menurut Budiani (2007) antara lain sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, dan tujuan program.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif yang dimulai dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen jika dilihat dari aspek efektivitas belum terlaksana dengan baik. Hasil tersebut dilihat dari aspek sosialisasi program yang belum berjalan dengan efektif karena informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi belum tersampaikan dengan baik kepada para KPM. Sedangkan ketiga aspek lainnya sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen masih perlu dilakukan peningkatan efektivitasnya.

Kata Kunci : BPNT, Efektivitas, Kemiskinan

Abstract :

This study employs policy analysis theory to measure program effectiveness as seen from four aspects of effectiveness according to Budiani (2007): program socialization, accuracy of program targets, program monitoring or supervision, and program objectives. The goal of this research is to determine how effective the distribution of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program is in reducing poverty in Karangduwur Village, Petanahan District, Kebumen Regency.

In this research, a qualitative approach was used using descriptive methods. The data collection techniques used in this research used interviews, observation and documentation. The analysis technique used in this research is a qualitative descriptive method which starts

from the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research indicate that the distribution of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Karangduwur Village, Petanahan District, Kebumen Regency, if seen from the aspect of effectiveness, has not been implemented well. These results are seen from the aspect of program socialization which has not run effectively because the information conveyed during the socialization has not been conveyed well to the KPMs. Meanwhile, the other three aspects are running well. The results of this research indicate that the distribution of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Karangduwur Village, Petanahan District, Kebumen Regency still needs to increase its effectiveness.

Keywords : BPNT, Effectiveness, Poverty

Pendahuluan

Kemiskinan dapat diartikan dengan keadaan atau kondisi dimana terdapat kekurangan pada hal-hal yang sifatnya pokok atau dasar yang berkaitan dengan kualitas hidup seperti bahan baku makanan, pakaian, tempat tinggal, serta air bersih (Arfiani, 2009). BPS menggunakan konsep keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pendekatan kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Konsep ini berasal dari Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank. Menurut gagasan ini, kemiskinan dilirik sebagai bentuk keterbatasan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan atau *non* makanan yang dihitung dari aspek pengeluaran.

Untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, dibutuhkan kerja sama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mendukung upaya pengentasan kemiskinan dengan berbagai strategi yang diimplementasikan melalui berbagai kebijakan serta program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membagi strategi pengentasan kemiskinan menjadi dua kelompok, antara lain melindungi keluarga serta kelompok dan kelompok masyarakat yang berada dalam kemiskinan sementara dan membantu masyarakat dengan kemiskinan kronis melalui program pemberdayaan serta mencegah munculnya kemiskinan baru. Kedua strategi tersebut kemudian terbagi menjadi tiga program pengentasan kemiskinan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin, antara lain penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha.

BPNT adalah program bantuan pangan dari pemerintah yang berbentuk uang elektronik dan diberikan kepada KPM setiap bulan. Uang elektronik ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di toko tertentu yang bekerja sama dengan Himbara. Program ini menggantikan Program Subsidi Rastra dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pangan masyarakat. Pemerintah meluncurkan Program BPNT untuk meringankan beban masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan pangan masyarakat.

BPNT hanya diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi termiskin di suatu daerah. Keluarga ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dan nama mereka terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Program kebijakan BPNT ini sendiri telah ada sejak tahun 2017 yang diluncurkan secara bertahap di 44 Kota di Indonesia dan diperluas dengan seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2019 KPM BPNT mencapai 15,5 juta KPM. Di Kecamatan Petanahan sendiri khususnya di Desa Karangduwur, program BPNT mulai tersalur kepada KPM pada tahun 2018.

Keberjalanan sebuah program perlu diukur keefektifitasannya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh serta manfaat yang diperoleh dari sebuah program. Dengan pengukuran efektivitas, dapat dijadikan sebagai bahan perhitungan dan evaluasi bagi keberlanjutan program tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dengan menggunakan indikator pengukuran menurut (Budiani, 2007), yaitu Sosialisasi Program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, dan tujuan program.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu terapan yang memanfaatkan berbagai jenis metode penelitian dan argumen untuk menciptakan dan memindahkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah di tingkat politik yang berkaitan dengan kebijakan (William Dunn dalam (Bloom & Reenen, 2013). Dalam kaitannya dengan metodologi analisis kebijakan, William Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan sebuah proses pengkajian, maka dari itu diperlukan pembedaan antara metodologi, metode, serta teknik. (William N. Dunn, 2003), menyatakan bahwa metodologi analisis kebijakan merupakan penggabungan dari lima prosedur umum yang umum digunakan dalam memecahkan permasalahan, antara lain :

- a. Merumuskan masalah-masalah kebijakan
- b. Meramalkan kebijakan di masa depan
- c. Merekomendasikan aksi-aksi kebijakan
- d. Memantau hasil-hasil kebijakan
- e. Mengevaluasi kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi memiliki arti yang berkaitan, masing-masing menunjukkan penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil program dan kebijakan. Istilah evaluasi juga dapat diartikan dengan penaksiran, pemberian angka serta penilaian, kata-kata yang menunjukkan upaya untuk mempelajari hasil kebijakan dengan cara

yang berbeda. Lebih detailnya, evaluasi berkaitan dengan produksi data tentang nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan. pada saat hasil kebijakan pada nyatanya memiliki nilai, hal itu dikarenakan hasil dari kebijakan tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran yang diharapkan. Keberhasilan program atau kebijakan ditunjukkan dengan pencapaian kinerja yang signifikan, yang berarti bahwa permasalahan yang melatarbelakanginya telah teridentifikasi dan ditangani secara efektif (William N. Dunn, 2003).

Evaluasi memegang peran penting dalam analisis kebijakan. Pertama, evaluasi menyediakan informasi terpercaya dan kredibel mengenai kinerja kebijakan, termasuk sejauh mana tindakan publik mampu memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang masyarakat. Kedua, evaluasi membantu menjelaskan dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target kebijakan, dengan cara mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan tersebut.

Evaluasi dalam analisis kebijakan memiliki enam kriteria antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam penelitian kali ini, kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah efektivitas. Terdapat beberapa indikator untuk menilai efektivitas antara lain sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, serta tujuan program (Firdausa & Usnan, 2023).

Efektivitas Kebijakan

Sosialisasi program bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program tersebut, termasuk cara kerjanya dan siapa saja yang berhak menjadi peserta. Ketepatan sasaran program penting untuk memastikan bahwa program ini menjangkau orang-orang yang paling membutuhkannya. Untuk mencapai sasaran program, diperlukan penentuan target yang tepat, baik oleh individu maupun organisasi, dengan fokus jangka pendek dan operasional.

Pemantauan dan pengawasan program merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh lembaga setelah program dimulai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara berkala tentang kinerja seluruh peserta program. Informasi ini digunakan untuk melihat apakah program sudah berjalan sesuai dengan rencana dan apakah ada yang perlu diperbaiki. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program telah mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Tujuan program menunjukkan tentang seberapa dekat hasil kegiatan dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Pemantauan dan pengawasan membantu memastikan bahwa program mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Evaluasi ini difokuskan pada empat indikator pengukuran yaitu sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, serta tujuan program. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dengan informasi pemerintah Desa Karangduwur sekaligus operator SIKS-NG, pendamping PKH Kecamatan Petanahan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dan staff bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial pada Dinsos P3A Kabupaten Kebumen, informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*.

Data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian kali ini merupakan data yang sesuai dengan fakta di lapangan dan informan yang diperoleh dari pemberi data. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada saat melakukan penelitian di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, dan Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan beserta pembahasan yang mendasarinya. Dalam pembahasan ini akan dibagi ke dalam 4 poin pembahasan berdasarkan 4 aspek efektivitas menurut Budiani (2007) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pemantauan atau pengawasan program, dan tujuan program.

Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan transisi dari program Rastha atau beras untuk keluarga sejahtera, dimana program tersebut merupakan program bantuan yang memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg beras/bulan, untuk memastikan bahwa program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, serta tepat administrasi. BPNT bertujuan untuk membantu meminimalisir beban pengeluaran KPM dengan kebutuhan pangan serta memberikan gizi yang lebih seimbang kepada para KPM. Penerima manfaat dari BPNT sendiri merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

. Program kebijakan BPNT ini sendiri telah ada sejak tahun 2017 yang diluncurkan secara bertahap di 44 Kota di Indonesia dan diperluas dengan seiring

berjalannya waktu hingga pada tahun 2019 KPM BPNT mencapai 15,5 juta KPM. Di Kecamatan Petanahan sendiri khususnya di Desa Karangduwur, program BPNT mulai tersalur kepada KPM pada tahun 2018.

Besaran bantuan BPNT pada awalnya sebesar Rp 110.000/KPM/Bulan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu besaran bantuan tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp 150.000/KPM/Bulan, hingga saat ini sebesar Rp 200.000/KPM/Bulan. Bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang sesuai dengan komoditas pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan pada bulan pencairan, maka nilai bantuan akan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan dengan jangka waktu tertentu. E-Warong merupakan agen bank, pedagang, atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.

Kemudian, pemanfaatan dana bantuan oleh KPM dapat digambarkan sebagai berikut :

- I. Datang : Kunjungi e-Warong terdekat dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
- II. Cek : Periksa saldo bantuan pangan di e-Warong menggunakan mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
- III. Pilih : pilih jenis bahan pangan yang dibutuhkan seperti beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan. Pembayaran dilakukan dengan memasukkan PIN KKS pada mesin EDC. .
- IV. Terima : Terima bahan pangan yang telah dibeli dan simpan bukti transaksi untuk disimpan.

Sebelum penyaluran BPNT dilakukan beberapa persiapan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan persiapan e-warong. Koordinasi pelaksanaan sendiri dilakukan beberapa tahap dimulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Proses penyaluran BPNT terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

- I. Penyaluran dana BPNT dilakukan secara gratis oleh Bank Penyalur.
- II. Pemindahan Dana dari Kas Negara: Dana BPNT ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur.
- III. Penyaluran ke Rekening KPM: Paling lambat 30 hari setelah dana masuk ke rekening KPA, Bank Penyalur memindahkan dana BPNT ke rekening wallet KPM BPNT.
- IV. Jadwal Penyaluran: Penyaluran dana BPNT ke rekening wallet KPM paling lambat dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan.

- V. Landasan Hukum: Proses penyaluran BPNT mengikuti peraturan perundang-undangan terkait Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjelaskan tentang bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan dalam meneruskan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang bagaimana program dilaksanakan dan sasaran peserta pada umumnya. Pemberian sosialisasi pada sebuah program kepada sasaran yang dituju oleh program tersebut merupakan langkah yang paling awal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam pelaksanaan program nantinya. Melalui sosialisasi program, maka masyarakat dapat lebih mengerti mengenai informasi sebuah program seperti apa tujuan program tersebut, bagaimana mekanisme pelayanan, dan lainnya (Adnan & Farhani, 2021). Sosialisasi dalam pelaksanaan program BPNT ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengertian bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah terkait kebijakan dan program BPNT.
- b. Memberikan pengertian kepada KPM mengenai tujuan serta bagaimana cara pemanfaatan program BPNT.
- c. Memberikan informasi terkait bagaimana cara pengaduan program BPNT.

Sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan BPNT tahun 2019, terdapat beberapa materi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan tujuan program BPNT;
- b. Prinsip pelaksanaan Program BPNT;
- c. Mekanisme pelaksanaan Program BPNT;
- d. Produk dan tata cara penggunaan KKS;
- e. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan.

Dalam penyaluran program BPNT di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen sosialisasi dilakukan oleh beberapa pihak seperti pemerintah desa, pendamping kecamatan, dan Koordinator daerah. Sosialisasi dalam penyaluran BPNT sendiri memiliki beberapa sasaran antara lain K/L terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga pelaksana BPNT, KPM, pemilik atau agen e-Warong, Bank Penyalur, dan masyarakat umum. Pelaksanaan sosialisasi penyaluran BPNT bagi agen e-warong berbeda dengan sosialisasi bagi para KPM. Sosialisasi bagi agen e-warong dilaksanakan di setiap kecamatan. Di Kecamatan Petanahan sendiri sosialisasi dilaksanakan dengan memanggil para pemilik agen e-warong dan dilakukan sosialisasi oleh pihak Kecamatan. Sosialisasi dilakukan pada awal adanya program BPNT dan mendekati waktu pencairan BPNT. Sosialisasi yang dilaksanakan mendekati waktu pencairan dilatarbelakangi karena adanya

gejolak pasar yang mengakibatkan kenaikan harga barang pada minggu pencairan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mencari jalan tengah agar bagi agen e-warong dan KPM.

Di Desa Karangduwur sendiri, sosialisasi dilaksanakan hampir setiap bulannya bertepatan dengan musyawarah desa. Sosialisasi dilaksanakan sekaligus membahas mengenai sumber data penerima BPNT di Desa Karangduwur. Sosialisasi dihadiri oleh tokoh masyarakat di desa Karangduwur dan perwakilan KPM pada masing-masing dusun di Desa Karangduwur. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduwur berupa sosialisasi bagaimana cara agar masyarakat yang kurang mampu dapat terdaftar ke dalam DTKS dan kebijakan-kebijakan baru yang telah disosialisasikan oleh pihak Kecamatan. Nantinya, KPM yang diundang untuk hadir dalam musyawarah desa bertanggungjawab untuk meneruskan informasi kepada masyarakat dan KPM lain di Desa Karangduwur. Akan tetapi, informasi yang disampaikan pada waktu sosialisasi kerap tidak tersampaikan secara langsung kepada para KPM lain, hal tersebut disebabkan karena terbatasnya perwakilan KPM yang diundang untuk hadir dalam musyawarah desa dan perwakilan tersebut tidak meneruskan informasi yang didapat kepada para KPM lain.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Karangduwur sekaligus operator SIKS-NG sebagai berikut :

“Sosialisasi lewat media sosial ada, dari struktural pemerintahan itu setiap tahun lewat kecamatan ada, tetapi yang hadir pemerintah desa. Nanti dari pemerintah desa disosialisasikan setiap saat. Karena setiap bulan membahas tentang sumber data bpnt namanya data DTKS, setiap bulan mengadakan musyawarah desa pesertanya perwakilan masyarakat dari setiap dusun.”

Dinsos P3A Kabupaten Kebumen juga melaksanakan sosialisasi melalui Koordinator Daerah. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Koordinator Daerah, informasi yang disampaikan yaitu terkait dengan komoditas barang yang harus dibeli. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui tujuan dari adanya program BPNT itu sendiri. Koordinator Daerah juga berperan dalam mengkoordinasikan harga barang ketika terjadi gejolak pasar mendekati waktu pencairan bantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Daerah turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi yang dihadiri secara langsung oleh para KPM melalui pertemuan desa atau pada saat kegiatan di Kecamatan. Sosialisasi melalui media sosial juga dilakukan oleh Dinsos P3A Kabupaten Kebumen melalui instagram mereka. Informasi yang disebarakan yaitu tentang bagaimana tata cara pengajuan data DTKS.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan baik dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen melalui Koordinator daerah hingga pemerintah Desa Karangduwur itu sendiri. Materi pada sosialisasi yang telah dilakukan pun sudah sesuai dengan materi yang tercantum dalam buku Pedoman

Umum BPNT 2019, namun dengan terbatasnya KPM yang diundang pada saat sosialisasi menyebabkan KPM tidak merasa menerima sosialisasi dan tidak dapat menerima informasi yang disampaikan. Selain itu, dengan terbatasnya akses KPM untuk mendapatkan sosialisasi menyebabkan banyak dari KPM yang kurang memahami tentang tujuan program BPNT.

Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran dapat diartikan seberapa tepat program menjangkau sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini, aspek ketepatan sasaran program digunakan untuk mengukur apakah peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sasaran utama penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan peserta program keluarga harapan atau penerima bantuan dan pemberdayaan sosial lain. Sasaran program atau Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi yang bernama SIKS-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation*.

Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang menghadirkan data kemiskinan yang akurat khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Aplikasi tersebut dapat mengubah serta mengusulkan warga ke dalam DTKS atau kepesertaan Program Bantuan Sosial. Saat ini, hampir di setiap desa telah memiliki operator SIKS-NG yang bertugas untuk melakukan input data dan melakukan pembaruan data kemiskinan yang ada di setiap desa atau kelurahan masing-masing. Akan tetapi, tidak semua masyarakat yang terdata di dalam DTKS merupakan penerima manfaat BPNT.

Sasaran program BPNT ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga, pihak desa hanya dapat memfasilitasi pengusulan agar masyarakat yang termasuk ke dalam kategori kurang mampu dan ingin mendapatkan BPNT dapat terinput ke dalam data DTKS. Masyarakat yang menerima bantuan BPNT di Desa Karangduwur dinilai sudah tepat sasaran atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Desa Karangduwur sendiri menilai bahwa masyarakat yang menerima program bantuan BPNT sudah tepat dikarenakan data yang ada hampir setiap bulannya selalu diperbarui melalui musyawarah desa.

Gambar SEQ Gambar * ARABIC 1.
Data Penerima BPNT Desa Karangduwur tahun 2023

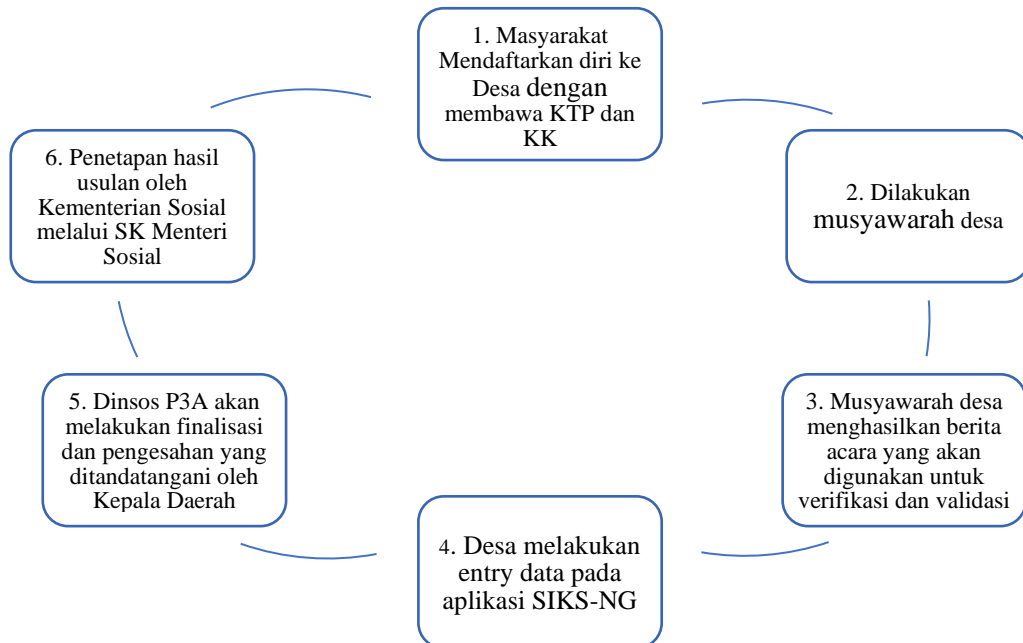
No.	Periode	PT. POS	Bank Mandiri	Jumlah
1	Januari	2	368	370
2	Februari	2	368	370
3	Maret	2	372	374
4	April	4	372	376
5	Mei	4	367	371
6	Juni	4	367	371
7	Juli	8	356	364
8	Agustus	8	356	364
9	September	8	340	348
10	Oktober	13	340	353
11	November	13	339	352
12	Desember	13	339	352

Sumber : dokumen Dinsos P3A Kabupaten Kebumen

Sasaran dalam sebuah program kebijakan dapat dikatakan efektif apabila unsur-unsur yang melengkapinya salah satu unsur dari sebuah program terpenuhi, atau dapat dilihat dari ketepatan sasaran program dengan cara melihat indikator pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan atau belum serta kepada siapa dan untuk siapa program tersebut dibuat. Sasaran program BPNT berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial yang kriterianya tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin.

Masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut dapat mengajukan permohonan ke pihak desa dengan membawa KK, KTP, serta foto rumah untuk diunggah pada aplikasi SIKS-NG. Akan tetapi, sebelum sampai ke tahap pengunggahan data pengusul pada aplikasi SIKS-NG akan dilakukan musyawarah desa terlebih dahulu, ketika seluruh pihak dalam musyarah tersebut sudah menyetujuinya akan ada berita acara yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, RT, RW, dan pihak lain yang berkaitan. Berita acara tersebut nantinya akan digunakan oleh Dinas Sosial P3A untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Setelah itu, barulah pihak desa akan melakukan input data pada aplikasi SIKS-NG, kemudian akan dilakukan finalisasi dan pengesahan yang telah ditandatangani Kepala Daerah oleh Dinas Sosial P3A. penetapan hasil pengajuan tersebut nantinya akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial.

Gambar SEQ Gambar * ARABIC 2.
Alur Pengusulan data DTKS



Terdapat kuota dalam penerimaan program BPNT ini, sehingga masyarakat yang sudah diusulkan dalam pengajuan data DTKS harus menunggu di daftar tunggu hingga adanya kuota. Kuota penerima program BPNT berskala nasional sehingga apabila dari Desa Karangduwur terdapat KPM yang dinonaktifkan, belum tentu masyarakat Desa Karangduwur yang berada di daftar tunggu bisa secara langsung menjadi KPM BPNT.

Saat ini penerima program BPNT atau KPM BPNT di Desa Karangduwur hampir sebagian besar sudah tepat sasaran. Di Desa Karangduwur sendiri selalu dilakukan update data DTKS melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan KPM serta tokoh masyarakat dari masing-masing dusun sehingga KPM BPNT di Desa Karangduwur memang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Pemantauan atau Pengawasan Program

Pemantauan atau pengawasan program adalah tindakan pengumpulan informasi yang dilakukan secara bertahap untuk melihat bagaimana kinerja seluruh pelaksana program serta untuk memastikan seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip dan aturan program. Pemantauan atau pengawasan program bertujuan untuk menjaga agar program atau kebijakan yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut (Adnan & Farhani, 2021), pengawasan atau pemantauan program dapat dilakukan dengan mengecek program dan membandingkan hasil yang telah

dicapai dari program tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam mencapai tujuan program maka dapat dievaluasi dan diperbaiki dengan tindakan khusus. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi dalam penyaluran program BPNT di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Dimulai dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang melakukan pemantauan melalui pihak ketiga, yaitu bank penyalur yang selalu melaporkan realisasi penyaluran pada setiap tahap penyaluran. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa KPM menerima bantuannya. Apabila terdapat bantuan yang belum tersalurkan kepada KPM, akan dilakukan tindakan lebih lanjut ke desa agar KPM tersebut segera mencairkan bantuannya.

Sementara itu, pada tingkat Kecamatan juga dilakukan pemantauan atau pengawasan melalui pendamping. Pendamping melakukan monitoring dengan cara turun langsung ke lapangan pada saat penyaluran bantuan dan melakukan pemantauan melalui handphone untuk menerima aduan pada saat penyaluran berlangsung. Apabila terdapat permasalahan pada saat penyaluran berlangsung, maka akan difasilitasi oleh pihak pendamping untuk penyelesaiannya. Masalah-masalah yang kerap terjadi antara lain hilangnya sinyal pada mesin EDC pada agen e-Warong dan saldo KKS yang 0 pada saat penyaluran berlangsung. Maka nantinya akan dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama pihak terkait.

Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangduwur. Pemantauan yang dilakukan melalui musyawarah desa. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan sumber data penerima BPNT atau data DTKS di Desa Karangduwur. Apabila terdapat masyarakat yang sudah tidak layak untuk menerima BPNT maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut dengan menidaklayakkan KPM tersebut pada aplikasi SIKS-NG dengan persetujuan forum musyawarah desa. Selain pengecekan data DTKS, pemerintah desa juga memfasilitasi masyarakat Desa Karangduwur yang ingin mengajukan diri sebagai penerima BPNT.

Tujuan Program

Tujuan program adalah melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian hasil akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya penetapan sebuah tujuan. Agar tercapainya tujuan akhir dapat terjamin, dibutuhkan pelaksanaan yang baik di setiap tahapnya dari segi pencapaian setiap bagiannya maupun pentahapan dalam arti waktu. Maka dari itu, dengan adanya penetapan tujuan, pelaksana program nantinya hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam buku pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019 disebutkan bahwa tujuan dari program kebijakan BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui :

- i. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- ii. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada para KPM;
- iii. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, kualitas, harga, dan administrasi; serta
- iv. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Nurhasan et al., 2021) dikatakan bahwa indikator tujuan program dapat dikatakan tercapai apabila penerima bantuan sudah merasakan manfaatnya. Selain itu, KPM juga dapat membelanjakan dana BPNT untuk membeli kebutuhan pangan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yang lebih seimbang.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dimana KPM di Desa Karangduwur merasa terbantu dengan adanya program BPNT, dikarenakan dengan adanya bantuan yang diberikan dapat menekan sebagian pengeluaran untuk membeli kebutuhan pangan khususnya beras. Selain itu, dengan adanya penyaluran BPNT juga sangat bermanfaat bagi KPM karena dengan adanya bantuan bahan pangan KPM dipastikan dapat mengonsumsi protein dari telur atau daging yang diberikan melalui program BPNT. Maka dari itu, indikator tujuan program pada penyaluran BPNT di Desa Karangduwur dapat dikatakan sudah efektif karena KPM telah sebagai penerima bantuan sudah merasakan manfaat dari BPNT. Selain itu, program BPNT sangat membantu masyarakat miskin dalam menekan sebagian pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen terkait penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karangduwur maka didapat hasil sebagai berikut :

Sasaran program BPNT di Desa Karangduwur sudah sesuai dengan kriteria data DTKS sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin. Selain itu, di Desa Karangduwur sendiri selalu diadakan musyawarah desa untuk mengupdate data DTKS dan penerima BPNT sehingga apabila KPM tersebut sudah tidak layak maka akan ditindaklanjuti dengan pentidaklayakan pada aplikasi SIKS-NG.

Dalam aspek sosialisasi program, sosialisasi BPNT dilaksanakan oleh pemerintah desa Karangduwur bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah desa, melalui pertemuan PKH desa setiap bulannya, melalui koordinator daerah dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Akan tetapi, dengan terbatasnya undangan KPM agar dapat menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan sebagian besar KPM di

Desa Karangduwur tidak menerima sosialisasi. Sosialisasi diberikan pada musyawarah desa dengan perwakilan dari KPM yang menyebabkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dan pihak terkait tidak sampai kepada KPM di Desa Karangduwur.

Dalam aspek pemantauan atau pengawasan program, pemantauan dilakukan baik dari pihak Dinsos P3A Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kecamatan Petanahan, dan Pemerintah Desa Karangduwur. Kegiatan pemantauan tersebut sangat membantu dan berdampak baik untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan pada saat penyaluran, proses update data KPM di Desa Karangduwur agar data yang ada tetap akurat, hingga memastikan bahwa KPM sudah menerima bantuan tersebut dengan benar.

Dalam aspek tujuan program, KPM di Desa Karangduwur sangat terbantu karena dengan adanya bantuan BPNT dapat menekan pengeluaran untuk pangan setiap bulannya. Selain itu, dengan adanya penyaluran program BPNT di Desa Karangduwur juga bermanfaat bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan protein mereka, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan penyaluran BPNT yaitu memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan indikator ketepatan sasaran, maka pemerintah desa harus terus melakukan update data penerima BPNT agar data yang ada tetap akurat dan bantuan dapat diterima oleh pihak-pihak yang memang membutuhkan.
2. Berkaitan dengan sosialisasi program, maka pihak desa dapat memberikan sosialisasi terkait penyaluran program BPNT khususnya tentang penggunaan dana dan komoditas pangan yang sesuai dengan kriteria agar dana bantuan tersebut digunakan dengan baik oleh KPM dan sesuai dengan tujuan BPNT.
3. Berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan program, maka instansi terkait dan pemerintah desa dapat terus melakukan pengawasan baik melalui musyawarah desa maupun turun secara langsung ke lapangan pada saat pencairan BPNT.
4. Berkaitan dengan tujuan program, maka instansi terkait dan pemerintah desa dapat menegaskan kembali melalui sosialisasi terkait tujuan dari adanya BPNT agar untuk saat ini ketika bantuan sudah berbentuk tunai, masyarakat dapat tetap menggunakan dana bantuan tersebut untuk membeli bahan pangan yang sesuai dengan komoditas pangan dan sesuai dengan tujuan yang ada.

(Oktaviani & Susetyo, 2022)(Luthfi, 2019)(Ridha et al., 2021)

Daftar Pustaka

- Adnan, M. F., & Farhani, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 65–78.
- Arfiani, D. (2009). Berantas Kemiskinan. In *Alprin Finishing* (Issues 978-979-053-079–9).
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Firdausa, M. A., & Usnan, U. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada BAZNAS Kota Surakarta). *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)*, 2(2), 133–141. <https://doi.org/10.22515/juebir.v2i2.7847>
- Nurhasan, R., Kusrin, & Purnamasari, H. (2021). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 274–283. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5763945>
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).